



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 13/HK.03.1/1372/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, kelembagaan dan kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

tentang...

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

ASRAF DANIL H



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

NOMOR 13/HK.03.1/1372/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2022**

[illegible]

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3) Persentase (%) pelaporan LHKASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			c) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	4) Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : a) Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b) Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan								√					
			d) Pembangunan Zona Integritas	5) Deklarasi pencanangan Zona Integritas KPU Kota Solok													
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kota Solok	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kota Solok							√	√	√	√	√	√	
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian							√	√	√	√	√	√	
			5. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kota Solok							√						
				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kota Solok									√			√	
		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan						√						√	
			2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja						√						√	
				2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE)						√						√	
			3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada:Tim pengarah dan Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	1. Tim RB KPU Provinsi menerima pelaporan: a) SK Tim RB, Tim Agen Perubahan b) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kota Solok c) Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit)						√						√	

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya						√						√	
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kota Solok	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kota Solok	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kota Solok							√	√	√	√	√	√	
		2. Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi								√	√	√	√	√	
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi								√	√	√	√	√	
		4. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan								√	√	√	√	√	
		5. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kota Solok	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi									√				
			2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI									√				
		2. Penyusunan SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK Satuan Kerja sesuai mandat.	1. SOTK Satuan Kerja sesuai mandat									√	√	√	√	
			2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi satuan kerja	2. Struktur Organisasi satuan kerja									√	√	√	√	
4	Penguatan Tatalaksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kota Solok	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kota Solok	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis							√						

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi							√						
				3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi							√						
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja							√						
			2. Evaluasi proses bisnis dilingkungan satuan kerja;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi							√						
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kota Solok	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP							√						
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP							√						
				3. SOP sudah dilegalkan							√						
				4. Seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan							√						
			4. Evaluasi SOP di lingkungan satuan kerja	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti												√	
	2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		1. Tata kelola PPID di lingkungan Satuan Kerja: 1) Penyampaian Kebijakan/Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja 2) Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3) Pengelolaan PPID dan e- PPID di lingkungan satuan kerja; 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID 5) Survei kepuasan pemohon informasi	1. Adanya kebijakan pendukung PPID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Meningkatnya kepuasan layanan PPID;								√				√	
				4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				5. Jumlah sengketa informasi;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6. Adanya rekomendasi/ pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan								√	√				
				7. Indeks kepuasan pemohon informasi.												√	
	3. Tata kelola dan implementasi		1. Tata Kelola SPBE di lingkungan	1. Kebijakan internal tata kelola									√				

[illegible]

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kepegawaian	lingkungan satuan kerja.													
			2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra satuan kerja	√					√							
			2. Reviu Renstra Satuan Kerja	Renstra hasil reviu						√							
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	√						√					√	
				2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward & Punishment							√	√	√	√	√	√	
				3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai							√	√	√	√	√	√	
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Persentase sasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja 2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total 2) Jumlah anggaran yang berhasil difocusing	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Solok	% Capaian kinerja satuan kerja												√	
			7. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kota Solok	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja satuan kerja									√			√	
				2. Reviu Lakip KPU Kota Solok						√							
			8. Pelaporan Kinerja Satuan Kerja	Pelaporan kinerja KPU Kota Solok						√						√	

[illegible]

[illegible]

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pelayanan Publik:														
			1. Standar Pelayanan: a) Prasyarat layanan b) Sistem Mekanisme Prosedur c) Produk Layanan d) Jangka waktu penyelesaian e) Biaya/tarif	1. Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat Undang-undang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Maklumat pelayanan	2. Tersedianya Maklumat Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Sistem informasi pelayanan publik	3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Sarana prasarana dan fasilitas	4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pelayanan Khusus kepada: a) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) b) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6. Pengelolaan Pengaduan a) Ketersediaan sarana pengaduan b) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; c) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan;	6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan	7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;						√							
			8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a) Ketersediaan visi dan misi pelayanan b) Ketersediaan moto pelayanan	8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			9. Atribut Pelayanan: a) berupa kartu identitas petugas; b) Kartu tamu; c) Buku tamu; d) Petunjuk arah ruang layanan	9. Atribut layanan dapat terlihat publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			10. Pelayanan terpadu satu pintu.	11. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan satuan kerja;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama	Adanya MoU dengan instansi terkait							√	√	√	√	√	√	

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu/pemilihan	Sosialisasi pemilu/pemilihan yang melibatkan masyarakat							√		√		√		
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan												√	

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

